

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 pasal 33, Negara harus menjamin perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial rakyatnya, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak berdasar atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam perekonomian di Indonesia Pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pemain, sesuai dengan UUD 1945 Pemerintah harus berperan serta dalam perekonomian dan melakukan intervensi jika diperlukan tetapi tetap mengakui keberadaan swasta.

Peran Pemerintah dalam perekonomian dapat dipilah menjadi empat macam kelompok peran (Dumairy, 1996;158), yaitu : Peran alokatif yakni peran Pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Peran distributif yakni peran Pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Peran stabilitatif yakni peran Pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Dan peran dinamisatif yakni peran

Pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Salah satu peran Pemerintah adalah peran distribusi, yang mana didalam peran ini mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian subsidi. Subsidi yang diberikan Pemerintah (subsidi daerah dan subsidi barang) juga pengeluaran Pemerintah disamping pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda Pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, angsuran dan bunga utang Pemerintah serta sejumlah pengeluaran lainnya.

Pengeluaran Negara dalam bentuk upaya pemindahan kekayaan kepada individu untuk kesejahteraan yang didalamnya termasuk subsidi disebut transfer Pemerintah (government transfer payment). Subsidi yang merupakan alat redistribusi pendapatan diartikan sebagai pajak negative. Hal ini berarti subsidi akan menambah pendapatan bagi si penerimanya/individu akan mengalami peningkatan pendapatan riil karena harga jual menjadi lebih rendah.

Subsidi (Grant Aid) merupakan transfer Pemerintah pusat yang merupakan bagian pengeluaran rutin atas pengeluaran negara dalam pemindahan kekayaan kepada individu untuk kesejahteraan rakyat. Menurut dsvey tujuan subsidi adalah:

1. Membiayai sebagian/seluruh biaya penyediaan barang dan jasa untuk kepentingan sosial.
2. Mendorong upaya Pemerintah daerah untuk program pembangunan dan pelayanan sehingga sejalan dengan kebijakan nasional.
3. Menyokong pertumbuhan ekonomi daerah.

Jenis-jenis subsidi berdasarkan penggunaannya terdapat tiga jenis subsidi:

1. Block Grant

Subsidi bagi daerah dimana daerah bebas menggunakannya.

2. Conditional Grant

Subsidi yang penggunaannya diarahkan oleh Pemerintah pusat. Antara lain diarahkan untuk proyek-proyek kesehatan, pariwisata, Keluarga Berencana dan lain-lain.

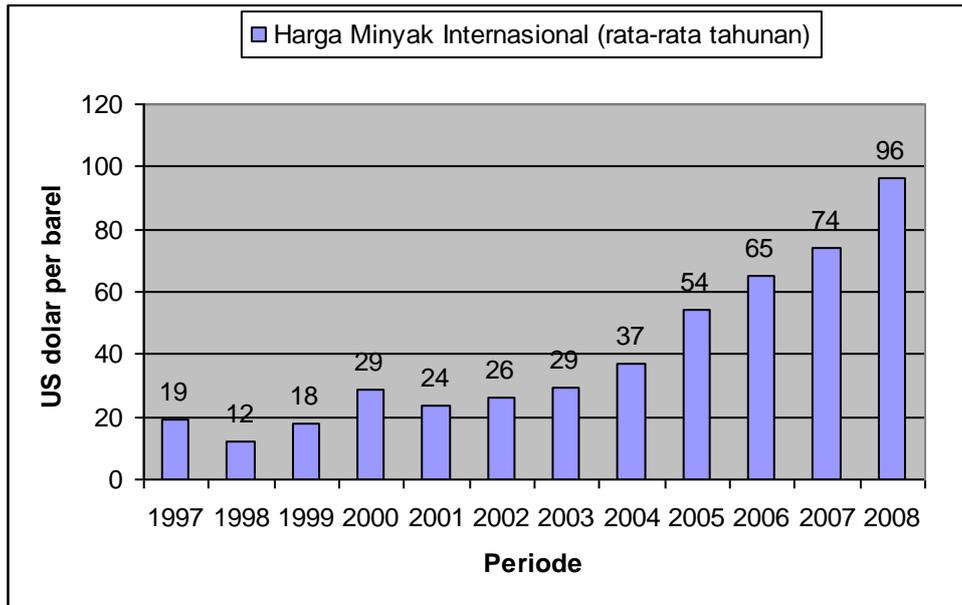
3. Matcing Grant

Pemberian subsidi kepada daerah dengan syarat daerah suda mempunyai sejumlah tertentu dan subsidi tersebut hanya pelengkap saja.

Subsidi Pemerintah terhadap harga BBM selama ini di pandang salah sasaran, hal ini dikarenakan sebagian besar subsidi tersebut justru dinikmati oleh masyarakat menengah atas, selain itu harga BBM yang murah mengakibatkan pemborosan penggunaan BBM, munculnya penyelundupan BBM, terjadinya pengoplosan BBM dan memberatkan APBN bahkan mengakibatkan defisit APBN. Oleh karena itu perlu ada suatu mekanisme yang memungkinkan masyarakat terutama masyarakat miskin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari subsidi Pemerintah

Seiring dengan tren meningkatnya harga minyak dunia, beban subsidi pemerintah terhadap harga BBM domestik semakin tinggi. Sedangkan produksi BBM dalam negeri tidak sebanding dengan konsumsi BBM dalam negeri. Sehingga pengeluaran APBN untuk subsidi BBM pun semakin meningkat, dapat dilihat dari berbagai gambar dibawah ini:

**Gambar 1. Perkembangan Harga Minyak Internasional**

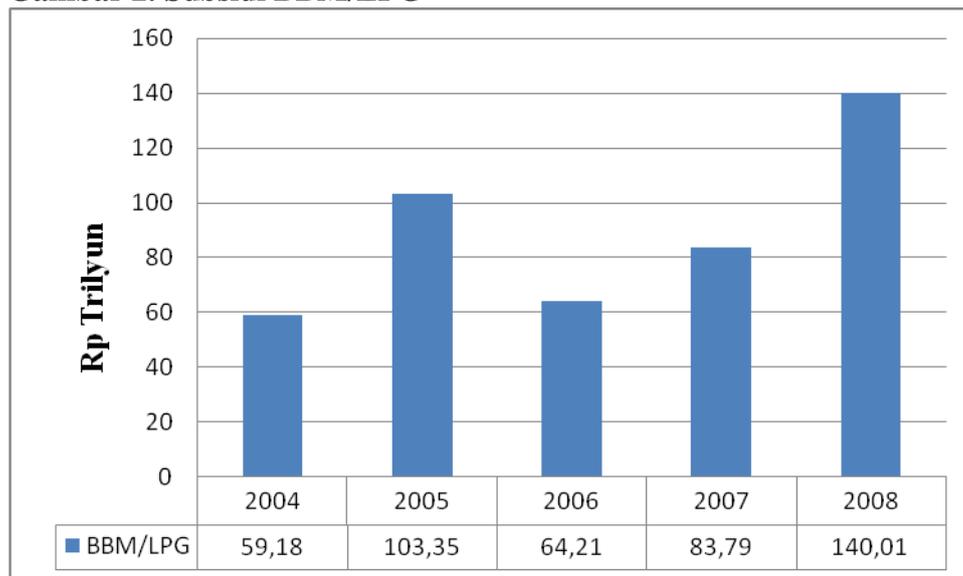


Perkembangan Harga Minyak Internasional Periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 (dalam US dolar per barel)

Sumber : <http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepcminasw.htm>, Data diolah.

Dari gambar di atas, dapat dilihat tren harga minyak internasional yang semakin meningkat setiap tahunnya. Harga minyak internasional meningkat terus dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Sehingga Pemerintah telah melakukan kenaikan harga BBM dalam negeri dan mengurangi subsidi BBM dua kali secara bertahap dari kurun tahun 2004 untuk menyesuaikan dengan harga minyak internasional. Pada tahun 2008 harga minyak internasional sempat melonjak sampai 145,19 dolar per barel sehingga memicu kenaikan harga BBM dalam Negeri untuk yang ketiga kalinya. Namun pada akhir bulan Juli 2008 mampu ditutupi oleh penurunan drastis pada bulan-bulan berikutnya hingga mencapai 40 dolar per barel pada bulan desember 2008. Penurunan harga minyak ini terkait krisis finansial global yang bersumber dari krisis di Amerika Serikat. Kemudian pemerintah melakukan penurunan harga BBM sebanyak dua kali pada kurun tahun 2009.

**Gambar 2. Subsidi BBM/LPG**

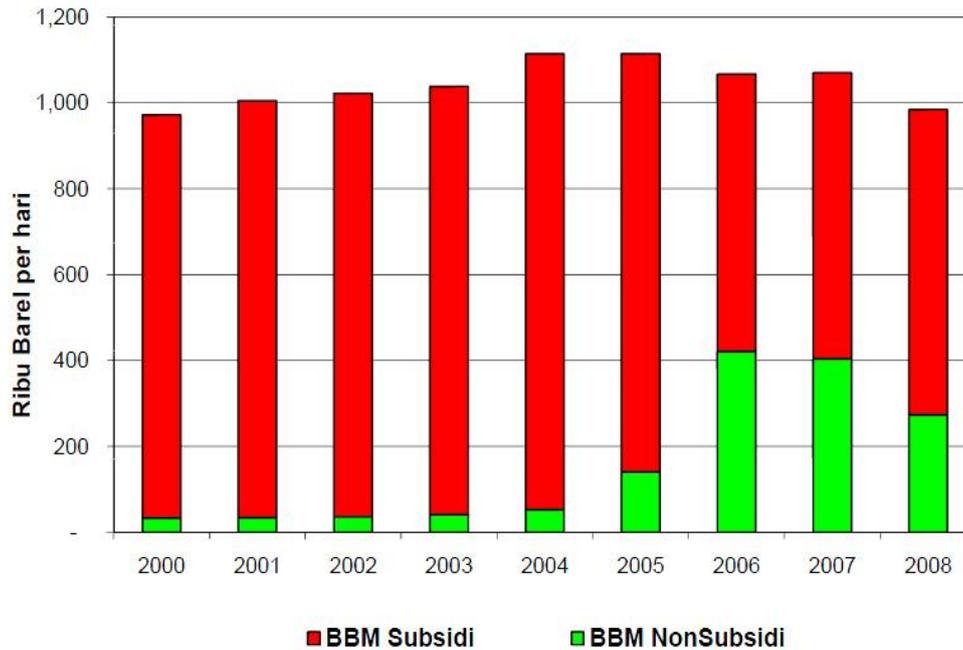


Perkembangan subsidi BBM/LPG periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008  
(dalam Rp Trilyun)

Sumber : [www.migas.esdm.go.id](http://www.migas.esdm.go.id). Data diolah

Dari gambar diatas, dapat dilihat tren kenaikan subsidi yang di keluarkan pemerintah untuk BBM/LPG dari tahun 2006 hinga 2007, walaupun terjadi penurunan pada tahun 2005 ke 2006, yakni dari 103,35 trilyun menjadi 64,21 trilyun. Hal ini karena terjadinya kenaikan harga BBM domestic oleh pemerintah pada priode tersebut. Tetapi dari priode 2006 hingga 2008 terus terjadi peningkatan, puncaknya pada tahun 2008 ketika harga minyak dunia melonjak tajam walaupun turun pada akhir tahun tersebut.

**Gambar 3. Pasokan BBM Domestik**

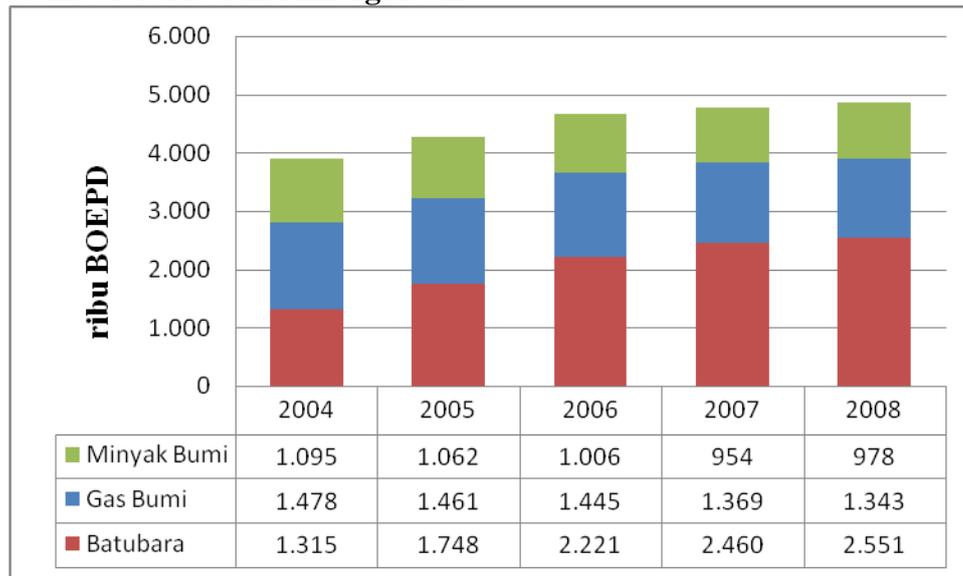


Perkembangan pasokan BBM domestik periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 (dalam ribu barel per hari)

Sumber : [www.migas.esdm.go.id](http://www.migas.esdm.go.id)

Dari gambar di atas dapat dilihat pasokan BBM domestik, yakni BBM subsidi dan BBM nonsubsidi dari periode tahun 2000 hingga tahun 2008. Jumlah BBM subsidi sangat jauh jaraknya dari jumlah BBM nonsubsidi yang beredar perhari, namun terjadi tren peningkatan BBM nonsubsidi dari tahun 2000 sampai dengan 2006. Terutama pada periode tahun 2005 ke 2006, karena pada saat itu terjadi kenaikan harga BBM oleh pemerintah, walaupun tren kenaikan harga minyak internasional tidak begitu besar. Kecuali pada tahun 2008, karena pada tahun itu harga minyak internasional menembus harga 145,19 dolar per barel, sehingga pasokan BBM domestik dan nondomestik pada saat itu menurun.

**Gambar 4. Produksi Energi Fosil**



Catatan : 2.551\*)masih ada produksi batubara 2008 dari KP daerah yang belum tercatat  
Perkembangan subsidi BBM/LPG periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008  
(dalam Rp Trilyun)

Sumber : [www.migas.esdm.go.id](http://www.migas.esdm.go.id)

Dari gambar di atas dapat kita lihat, penurunan produksi dalam negeri minyak bumi dari tahun 2004 sebesar 1.095 ribu BOEPD menurun terus hingga tahun 2007 sebesar 954 ribu BOEPD walaupun pada tahun 2008 mengalami sedikit kenaikan sebesar 978 ribu BOEPD. Serta gas bumi dari tahun 2004 sebesar 1.478 ribu BOEPD hingga tahun 2008 sebesar 1.343 ribu BOEPD juga terus mengalami penurunan produksi walaupun sangat sedikit. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa produksi energi fosil minyak bumi dan gas bumi selalu menurun karena merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga cadangan fosil dalam negeri tersebut semakin sedikit. Namun cadangan gas bumi masih lebih banyak dari pada minyak bumi.

Berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 Pasal 8 ayat 1 dan 2, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh

wilayah Republik Indonesia. Seperti yang tertuang dalam UU No 22 Tahun 2001 Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, “*Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah* “. Dan ayat 2 yang berbunyi, “*Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Sehingga Negara wajib menjamin ketersediaan BBM dalam negeri karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “*Harga Bahan Bakar minyak dan Gas Bumi di serahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar*”. Namun karena harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi menyangkut hajat hidup orang banyak maka peraturan tersebut diamandemen oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003) maka harga Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas ditetapkan oleh Pemerintah.

Karena tren harga minyak dunia yang selalu naik pemerintah merumuskan konsep kebijakan pengurangan subsidi BBM. Sesuai Perpres No 71 tahun 2005. Pemerintah memformulasikan:

$$\text{Subsidi BBM} = Q_{\text{BBM}} \times (\text{Harga Patokan BBM} - \text{Harga Jual BBM})$$

Subsidi diberikan kepada jenis BBM tertentu, yaitu premium (P), kerosene (K), dan solar (S), serta golongan konsumen tertentu, yaitu rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum. Atau subsidi harga minyak tanah merupakan selisih antara harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah dengan harga patokan minyak tanah, dengan formula:

$$\text{Subsidi} = \text{Volume}_{\text{Mitan}} \times (\text{Harga Patokan}_{\text{Mitan}} - \text{Harga Jual Eceran}_{\text{Mitan}})$$

Pengurangan subsidi BBM dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengurangan Q BBM tertentu, dengan cara:
  - a. Menghemat pemakaian BBM
  - b. Mengembangkan energy pengganti (alternatif) BBM (BBG dan Bahan Bakar Lain)
2. Pemilihan harga patokan BBM yang tepat
  - a. Menekan biaya distribusi BBM
  - b. Menghitung harga keekonomian penyediaan BBM
3. Rasionalisasi Harga Jual BBM (upaya terakhir)

Pada tahun 2006 subsidi minyak tanah mencapai Rp. 31,58 triliun atau sekitar 50% total subsidi Bahan Bakar Minyak yakni sebesar 64,21 trilyun. Penurunan subsidi minyak tanah dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan minyak tanah melalui penghematan atau menggunakan bahan bakar alternatif sebagai pengganti minyak tanah seperti LPG. Selain itu penghematan juga dapat dilakukan melalui efisiensi pendistribusian minyak tanah dan melakukan rasionalisasi harga jual minyak tanah mendekati harga keekonomiannya.

Pada tahun 2006 produksi minyak tanah dalam negeri sebesar 8,545 juta Kilo Liter sedangkan kebutuhan minyak tanah dalam negeri mencapai 10,023 juta Kilo Liter sehingga saat ini masih dilakukan impor sebesar 2,111 juta Kilo Liter termasuk untuk cadangan sebesar 633,881 ribu kilo liter, Produksi LPG Indonesia pada tahun 2006 mencapai 1.428 ton, sedangkan angka konsumsi hanya mencapai 1.100 ton sehingga masih mempunyai kuota untuk ekspor sebesar 289 ton. Berdasarkan landasan hukum di atas lahir rumusan sebuah program penghematan subsidi BBM, yakni dengan mengkonversi minyak tanah ke gas LPG 3 kilogram.

Pada tanggal 31 Agustus 2006 diterbitkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perihal hasil rapat terbatas mengenai koordinasi diverifikasi minyak tanah (mitan) ke LPG. Selanjutnya surat wakil presiden RI tahun 2006 tentang konversi pemakaian mitan ke LPG tanggal 1 September 2006. Kemudian pada tanggal 8 Mei tahun 2007 pelaksanaan pertama konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kilogram, yang diresmikan oleh Wakil Presiden RI di Kampung Makasar Jakarta Timur. Dilanjutkan dikeluarkannya surat peraturan presiden No 104 tahun 2007 tentang penyediaan dan penetapan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram pada tanggal 28 November 2007.

Setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan dana ±Rp 50 Trilyun untuk mensubsidi BBM: minyak tanah, premium dan solar. Dari ketiga jenis bahan bakar ini, minyak tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat subsidi terbesar (lebih dari 50% anggaran subsidi BBM digunakan untuk subsidi minyak tanah).

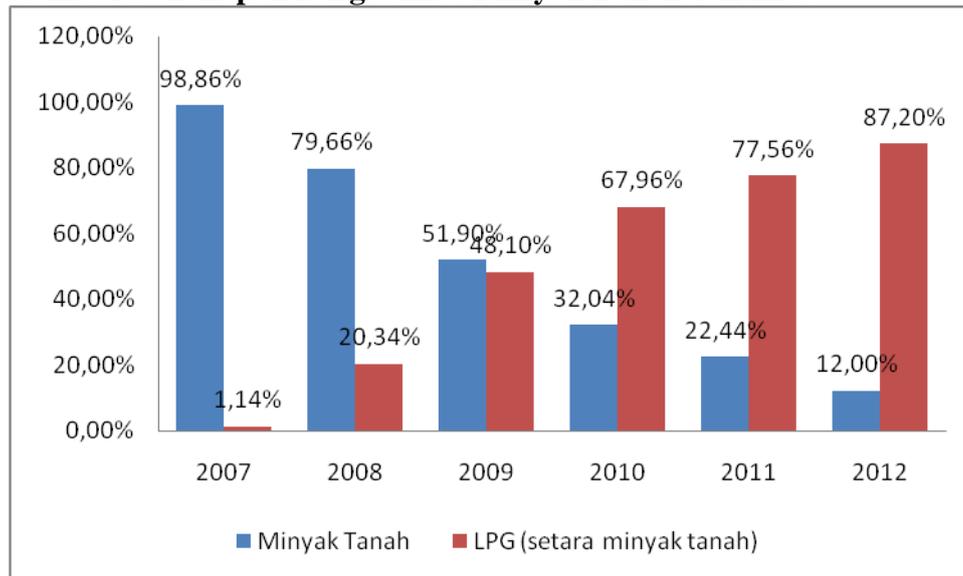
Dari tahun ke tahun anggaran ini semakin tinggi, karena trend harga minyak dunia yang cenderung meningkat.

Secara teori, pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0.57 kg LPG. Dengan menghitung berdasarkan harga keekonomian minyak tanah dan LPG, subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0.57 kg LPG akan lebih kecil dari pada subsidi untuk 1 liter minyak tanah. Secara nasional, jika program Konversi Minyak Tanah ke LPG berhasil, maka pemerintah akan dapat menghemat 15-20 Trilyun subsidi BBM per tahun. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari Konversi Minyak Tanah ke LPG adalah:

- Mengurangi kerawanan penyalahgunaan minyak tanah
- Mengurangi polusi udara di rumah/dapur
- Menghemat waktu memasak dan perawatan alat memasak
- Dapat mengalokasikan minyak tanah untuk bahan bakar yang lebih komersil (misalnya bahan bakar pesawat/avtur)
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Dalam *Blueprint* yang dibuat oleh Departemen Energi dan sumberdaya mineral tentang “*Program Pengalihan minyak Tanah Ke LPG (Dalam Rangka Pengurangan Subsidi BBM) Tahun 2007-20012*”. Dapat dilihat rancangan rencana tahapan pangsa LPG minyak tanah dan LPG dari tahun 2007- 2009, seperti gambar dibawah ini:

**Gambar 5. Tahapan Pangsa LPG Minyak Tanah dan LPG**



Catatan : pada tahun 2012 masih tersisa minyak tanah sebesar 12,8% dari baseline minyak tanah tahun 2006 (9,9 KL) dibuat tahun 2007

Rancangan rencana persentase volume LPG dan minyak tanah dari tahun 2007-2012 (dalam bentuk persentase (%))

Sumber : [www.migas.esdm.go.id](http://www.migas.esdm.go.id)

Dari gambar di atas dapat dilihat rancangan tahapan pangsa LPG minyak tanah dan LPG dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, yakni tahun 2007 sebagai tahun di awalnya program konversi minyak tanah ke Gas LPG, hingga tahun 2012 yakni target program akan selesai. Pada tahun 2007 persentase LPG sebesar 1,14 dan minyak tanah sebesar 98,60%, dan setiap tahun persentase LPG semakin bertambah dan persentase minyak tanah semakin dikurangi. Sehingga pada tahun 2012 persentase volume penggunaan LPG sebanyak 87,20% dan minyak tanah sebanyak 12,80%.

Juga dapat dilihat dari gambar dibawah ini tentang pemetaan Program Konversi minyak tanah ke gas LPG pada tahun 2009 yang dibuat oleh Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

**Gambar 6. Program Konversi 2009**



Catatan : Status pendistribusian sampai dengan tanggal 31 Maret 2009  
Pemetaan Program Konversi pada tahun 2009 terdiri dari daerah closed/Dry MT (merah), daerah konversi on progres (hijau), daerah belum konversi (kuning) dan daerah taerget konversi (coklat)

Sumber : [www.migas.esdm.go.id](http://www.migas.esdm.go.id)

Dari gambar di atas dapat dilihat daerah-daerah yang sudah closed/Dry MT (merah) dan daerah konversi on progres (hijau) pada tahun 2009. Yakni profinsi Sumatra Selatan, DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Sedangkan Lampung masih dalam daerah target konversi, tetapi pada pertengahan tahun 2009 Lampung sudah masuk daerah konversi on progress (hijau). Dan pada pertengahan tahun 2009 Profinsi Lampung telah memasuki daerah konversi on progress, yakni sudah berjalan di berbagai daerah terutama di Kota Bandar Lampung. Salah satunya adalah di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pusat yang telah terlaksana dari bulan Mei 2009.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala sehingga masyarakat tidak mau beralih dari minyak tanah ke gas LPG 3 kg. Salah satu penyebabnya adalah ketakutan masyarakat terhadap pemberitaan-pemberitaan terjadinya kebakaran (ledakan) gas LPG 3 kg di media masa. Data yang di peroleh penulis

telah terjadi kebakaran (ledakan) sebanyak 189 kali ledakan dari tahun 2008 hingga 2010. Yakni pada tahun 2008 sebanyak 61 kasus, pada tahun 2009 sebanyak 50 kasus dan 2010 sebanyak 78 kasus dari 10,1 juta paket yang dibagikan. Data bersumber dari Pusat Studi Kebijakan Publik.

sumber : <http://puskepi.com/page/22733/energi.html>

Pelaksanaan program konversi di Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pusat dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2009. Adalah salah satu wilayah pertama yang melaksanakan program konversi minyak tanah ke gas LPG TG kg di provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung. Data diperoleh dari Koran Kompas Kamis 16 April 2009 serta dari staf Kelurahan Kelapa Tiga.

sumber :

<http://regional.kompas.com/read/2009/04/16/20140638/Awal.Mei..Konversi.Gas.di.Lampung.Dimulai..>

Walaupun Kelurahan Kelapa Tiga terletak di pusat kota Bandar Lampung yakni di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kelurahan ini adalah salah satu daerah yang cukup banyak penerima paket konversi atau hampir semua masyarakat menerima paket konversi, Hal ini dikarenakan penduduk di Kelurahan Kelapa Tiga rata-rata adalah masyarakat golongan menengah kebawah sehingga banyak yang memenuhi kriteria masyarakat yang berhak menerima paket konversi. Jika dilihat dari pekerjaan sebesar 3,29 % sebagai PNS, 47,93 % sebagai wiraswasta dan 48,81 % adalah pengerajin. Sumber dari staf Kelurahan Kelapa Tiga.

Pada awalnya untuk memperhitungkan jumlah paket yang akan dibagikan kepada setiap Kepala Keluarga masyarakat didata oleh kelurahan untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima paket konversi melalui masing-masing ketua RT, yakni dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga. Selanjutnya data tersebut di sampaikan kekelurahan, dan dari kelurahan di data oleh pihak penyalur yakni Pertamina. Kemudian Pertamina menyalurkan paket konversi sesuai jumlah yang telah ditetapkan melalui aparat kelurahan. Satu paket tersebut berupa kompor gas satu tungku, tabung gas 3 kilogram isi perdana, dan selang + regulator. Jumlah masyarakat di Kelurahan Kelapa Tiga yang menerima paket konversi tersebut dapat dilihat dari Tabel.1 dibawah ini:

**Tabel 1. Jumlah Penerima Paket Konversi di Kelurahan Kelapa Tiga**

No.	Lingkungan	Jumlah Rumah Tangga
1.	I	679 KK
2.	II	942 KK
3.	III	714 KK
	Jumlah	2.335 KK

*Sumber : Kelurahan Kelapa Tiga*

Dari jumlah KK di kelurahan Kelapa Tiga sebesar 2.639 KK hanya 2.335 KK yang menerima paket tersebut. Terdapat 304 KK yang tidak menerima paket tersebut. Hal ini dikarenakan ada ketentuan-ketentuan dari pemerintah untuk menetapkan masyarakat yang berhak mendapatkan paket konversi. Apakah ketentuan tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh aparat kelurahan akan dilihat dari penelitian ini.

Konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg di Kelurahan Kelapa Tiga dilaksanakan pada bulan Mei pada tahun 2009 dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini. Kita dapat membandingkan efisiensi pengeluaran masyarakat

untuk bahan bakar rumah tangga dilihat dari penggunaan minyak tanah dengan LPG 3 kg dan LPG 12 kg. Kita dapat membandingkan dengan harga ke tiga barang tersebut dan tingkat kesetaraan penggunaannya. Namun harga minyak tanah semakin meningkat hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk menarik minyak tanah dari daerah yang telah melakukan konversi, sehingga pada bulan Mei harga minyak tanah sebesar Rp 4.500/liter dan saat ini sebesar Rp 6.500/liter. Pada dasarnya harga minyak tanah menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yaitu harga eceran bahan bakar minyak tanah untuk rumah tangga sebesar Rp 2.500/liter di titik serah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun dapat kita lihat pada tabel di bawah ini daftar harga minyak tanah, dari bulan Januari 2009 samapai dengan bulan Mie 2010

**Tabel 2. Daftar Harga Minyak Tanah**

Bulan	Harga (Rp)				
	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V
Januari 2009	3.800	3.800	3.800	3.800	-
Februari 2009	4.000	4.000	4.000	4.000	-
Maret 2009	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
April 2009	4.000	3.500	3.500	3.500	-
Mei 2009	3.500	3.500	3.500	3.500	-
Juni 2009	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Juli 2009	3.500	3.500	4.000	4.000	-
Agustus 2009	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
September 2009	7.000	7.000	7.000	7.000	-
Oktober 2009	7.000	7.000	7.000	7.000	-
November 2009	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
Desember 2009	6.500	6.500	6.500	6.500	-
Januari 2010	6.500	6.500	6.500	6.500	-
Februari 2010	6.500	6.500	6.500	6.500	-
Maret 2010	6.500	6.500	6.500	6.000	6.000
April 2010	6.500	6.500	6.500	6.500	-
Mei 2010	6.500	6.500	6.500	6.500	-

Sumber : Dinas Koperindag Kota Bandar Lampung

Pada Tabel di atas, dapat kita lihat terjadi kenaikan harga minyak tanah dari bulan Mei 2010. Yakni sebagai bulan pertama dilaksanakannya program konversi minyak tanah ke Gas LPG 3 kg di kota Bandarlampung khususnya pada kecamatan Tanjungkarang Pusat Kelurahan Kelapa Tiga.

**Tabel 3. Perbandingan Minyak Tanah, LPG 3 kg dan LPG 12 kg**

	Harga minyak tanah Bulan Mei	Harga minyak tanah Saat ini	Tabung Gas LPG 3 kg	Tabung Gas LPG 12 kg
			LPG	
Harga	Rp. 4.500.liter	Rp. 6.500/liter	Rp 15.000/3 kg	Rp 75.000/12 kg
			Rp 5.000/1 kg	Rp 6.250/1 kg
Kesetaraan	1 liter	1 liter	0,57 kg LPG	
Pemakaian (perbulan)	30 liter	30 liter	17,1 kg = 5,7 tabung	17,1 kg = 1,425 tabung
pengeluaran	Rp 135.000	Rp 195.000	Rp 85.500	Rp 106.875
Penghematan dari minyak tanah pada bulan Mei			Rp 49.500	Rp 28.125
Penghematan dari minyak tanah saat ini			Rp 109.500	Rp 88.125

Catatan : Dengan asumsi perbandingan 1 liter minyak tanah setara 0,57 kg LPG (diambil dari data Departemen ESDM dan diandaikan pemakaian minyak tanah 1 liter perhari

Dilihat dari tabel di atas, bahwa pemakaian LPG tabung 3 kilogram lebih hemat dari pada pemakaian LPG 12 kilogram apa lagi dengan pemakaian minyak tanah. Jika diandaikan pemakaian minyak tanah 1 liter perhari dan perbulan sebesar 30 liter maka pengeluaran masyarakat sebesar Rp 135.000/bulan di bulan Mei dan Rp 195.000/bulan saat ini. Sedangkan tabung LPG 12 kilogram sebesar Rp 106.875 dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 65.500 . Di mata masyarakat yang sudah berpindah ke LPG 3 kilogram maupun yang belum melakukannya biasanya sudah mengetahui penghematan tersebut. Walau sebagian besar masyarakat sudah berpindah dari minyak tanah ke gas LPG 3 kg namun bagi yang belum berpindah ke LPG tabung 3 kilogram ternyata ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka tetap bertahan menggunakan minyak tanah maupun LPG ukuran 12 kilogram. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari segi pelaksanaan Program Konversi minyak tanah ke Gas LPG 3 kilogram, maupun dari segi

sosialisasi kepada masyarakat. Juga terdapat permasalahan dalam hal penetapan sasaran (penerima), serta dampak dan hasil dari kebijakan program evaluasi konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kilogram. Untuk hal itu maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ”*Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Konversi Minyak Tanah Ke Gas LPG Tabung 3 Kilogram*”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg di kelurahan Kelapa Tiga
2. Faktor faktor apakah yang dominan menghambat pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg di Kelurahan Kelapa Tiga
3. Apakah pada masyarakat yang beralih ke gas LPG 3 kg mengalami penghematan pengeluaran untuk bahan bakar rumah tangga

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui tingkat keefektifan pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas LPG di kelurahan Kelapa Tiga
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang dominan dalam menghambat pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg di Kelurahan Kelapa Tiga

3. Untuk mengetahui apakah program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg dapat menghemat pengeluaran masyarakat dalam pengeluaran untuk bahan bakar rumah tangga

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam neraca anggaran pendapatan dan belanja negara, pengeluaran Pemerintah Indonesia secara garis besar di kelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda Pemerintah sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai subsidi (subsidi daerah dan subsidi barang), angsuran dan bunga Pemerintah serta jumlah pengeluaran lain.

Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang di biayai dengan rupiah dan bantuan proyek.

Pembangunan merupakan kegiatan yang terus menerus dilaksanakan oleh setiap negara baik negara yang tergolong maju maupun negara- negara yang sedang berkembang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan riil dan meningkatkan produktivitas ( Irawan dan Suparmoko, 1990:19).

Pembangunan ekonomi harus dirancang sedemikian rupa sehingga menjamin penggunaan faktor-faktor produksi yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai yaitu bertambahnya pendapatan perkapita, hapusnya kemiskinan dan pengangguran, mencapai neraca pembayaran Internasional yang seimbang dan tidak tergantung

pada pasar luar negeri baik untuk bahan dasar maupun hasil produksi ( Irawan dan Suparmoko,1990 : 229-230).

Seiring meningkatnya beban subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah karena semakin meningkatnya harga minyak dunia, pada bulan Maret dan Oktober 2005 Pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM secara drastis. Hal ini berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak yang diikuti dengan kenaikan harga barang-barang pokok lainnya termasuk minyak tanah.

Berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 Pasal 8 ayat 1 dan 2, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah Republik Indonesia. Maka pemerintah berkewajiban memenuhi dan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak didalam negeri. Namun akibat adanya kendala eksternal seperti tren kenaikan harga minyak dunia serta kendala internal seperti kekurangan produksi bahan bakar minyak dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar dalam negeri. Maka dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut Pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan pengurangan subsidi secara jangka panjang dan mencari energi pengganti yang lebih aman, lebih efisien, ramah lingkungan dan lebih murah sesuai Perpres No 71 tahun 2005. Kemudian lahirlah sebuah kebijakan baru untuk mengatasi itu semua yakni kebijakan program konversi minyak tanah ke LPG.

Melalui program ini, diharapkan beban anggaran pemerintah untuk subsidi energi berkurang, terutama untuk minyak tanah yang besarnya hampir mencapai 50%

subsidi energi lainnya setiap tahun. Masyarakat mendapatkan bahan bakar pengganti yang lebih murah, efisien, dan ramah lingkungan. Serta mengurangi penyalahgunaan energi bersubsidi seperti penyelundupan bahan bakar ke luar negeri.

## **E. Hipotesis**

1. Implementasi program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 di Kelurahan Kelapa Tiga telah berjalan dengan baik.
2. Faktor dominan yang menghambat pelaksanaan program konversi minyak tanah adalah berupa faktor eksternal atau diluar pribadi pengguna yaitu faktor kesulitan memperoleh tabung LPG 3 kg, faktor harga, dan faktor kesulitan menggunakan paket konversi LPG 3 kg akibat sosialisasi penggunaan paket konversi.
3. Penggunaan LPG 3 kg menhemat pengeluaran rumah tangga pengguna di bandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak tanah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini ditulis dan dituangkan kedalam lima (5) bab yang masing-masing bab memuat tentang :

Bab I           Pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan, hipotesis, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

- Bab II Tinjauan pustaka yang berisikan mengenai fungsi pemerintah, evaluasi program, kebijakan public, kebijakan subsidi, program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg. landasan hukum.
- Bab III Metode penelitian berisikan tentang jenis dan sumber data, alat analisis yang digunakan. dan gambaran umum kelurahan Kelapa Tiga
- Bab IV Pembahasan yang berisikan pembahasan dari permasalahan.
- Bab V Simpulan dan saran yang berisikan kesimpulan yang akan ditarik dari serta saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka.

Lampiran.